

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN
DI PASAR KAYUBULAN KABUPATEN GORONTALO**

SKRIPSI

Oleh

MARSANDA BIGA

NIM: 941417070

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Gorontalo, Agustus 2021

Pembimbing I,



Dr. Fenti Prihatini Dance Tui, S.Pd., M.Si.
NIP: 19780208 199903 2 001

Pembimbing II,



Rustam Tohopi, S.Pd., M.Si.
NIP:19790324 200812 1 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Administrasi Publik



Dr. Fenti Prihatini Dance Tui, S.Pd., M.Si.
NIP: 19780208 199903 2 001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN
DI PASAR KAYUBULAN KABUPATEN GORONTALO**

Oleh

**MARSANDA BIGA
NIM: 941417070**

Telah Memenuhi Syarat dan Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Hari/Tanggal : Senin, 02 Agustus 2021

Waktu : 10:00 WITA

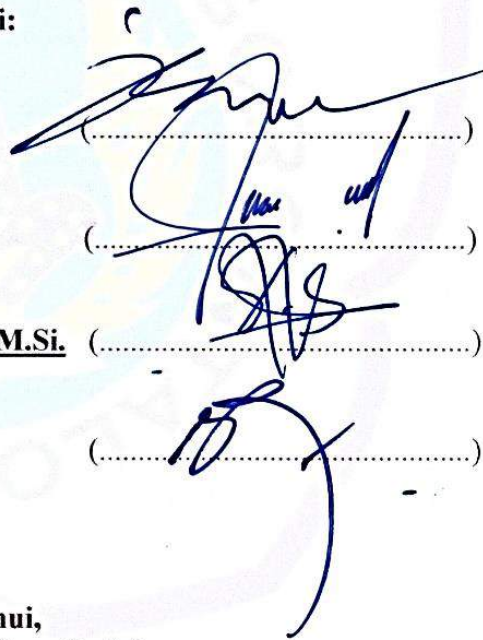
Penguji:

1. **Dr. Ismet Sulila, SE., M.Si.**
NIP. 19780318 200604 1 002

2. **Romy Tantu, S.Sos., M.Si.**
NIP. 19740126 200604 1 001

3. **Dr. Fenti Prihatini Dance Tui, S.Pd., M.Si.**
NIP. 19780208 199903 2 001

4. **Rustam Tohopi, S.Pd., M.Si.**
NIP. 19790324 200812 1 001



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Gorontalo**



Dr. Hj. Zylaecha Ngiu, M.Pd.
NIP. 19670509 199803 2 002

ABSTRAK

Marsanda Biga. 941417070. 2020. Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Di Pasar Kayubulan Kabupaten Gorontalo. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo dengan Pembimbing I Dr. Fenti Prihatini Dance Tui, S.Pd., M.Si. dan Pembimbing II Rustam Tohopi, S.Pd., M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan (1) bagaimana proses implementasi kebijakan retribusi pelayanan di Pasar Kayubulan Kabupaten Gorontalo, dan (2) faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan retribusi pelayanan di Pasar Kayubulan Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, (1) proses implementasi kebijakan retribusi pelayanan di Pasar Kayubulan Kabupaten Gorontalo, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi sudah dilakukan, namun belum efektif. Legalitas pungutan atas parkir, toilet, kebersihan pasar, dan penyewaan lapak milik pihak lain, masih menjadi kelemahan dalam tahap perencanaan. Dilihat dari tahap pelaksanaan, penerimaan retribusi di Pasar Kayubulan tidak mencapai target pada tahun 2020 karena adanya pandemi *Covid-19*. Selain itu, penetapan tarif retribusi belum sepenuhnya mengacu pada Perda Nomor 6 Tahun 2017. Sebab, mempertimbangkan kondisi 72% pedagang yang juga dibebankan dengan penyewaan lapak kepada pihak lain sebagai sarana untuk berdagang. Disisi lain, pemilik lapak tersebut tidak ditetapkan sebagai subjek retribusi di Pasar Kayubulan. Pada tahap evaluasi, prinsip akuntabilitas dan transparancy dalam pengelolaan retribusi di Pasar Kayubulan sudah diterapkan dengan menyertakan karcis pada saat pemungutan dan rekonsiliasi setiap 3 (tiga) bulan sekali; (2) faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan retribusi pelayanan di Pasar Kayubulan dapat ditingkatkan melalui koordinasi dan komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat, serta keaktifan kolektor dalam melaksanakan pemungutan retribusi. Namun, penyediaan fasilitas perlu direalisasikan secara efektif untuk meningkatkan potensi retribusi di Pasar Kayubulan. Struktur birokrasi juga belum mendukung secara maksimal karena belum ditetapkannya SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, esensi Kepala Pasar dan Kolektor belum ditunjukkan melalui Struktur Pengelola Pasar Kayubulan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Retribusi Pelayanan Pasar

ABSTRACT

Marsanda Biga. 941417070. 2020. Implementation of Service Retribution Policy at the Kayubulan Market, Gorontalo Regency. Department of Public Administration, Faculty of Social Sciences, State University of Gorontalo. The principal supervisor is Dr. Fenti Prihatini Dance Tui, S.Pd., M.Si., and the co-supervisor is Rustam Tohopi, S.Pd., M.Si.

This research aimed to identify and describe: (1) the process of implementing the service retribution policy at the Kayubulan Market, Gorontalo Regency, and (2) the factors that determine the success of the service retribution policy implementation at the Kayubulan Market in Gorontalo Regency. The method used in this research is a qualitative descriptive method. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and concluding.

The results showed that (1) the implementation of the service retribution policy at the Kayubulan Market, Gorontalo Regency, in the planning, implementation, and evaluation stages had been carried out but had not been effective. The legality of retributions on parking, toilets, market cleanliness and rental of stalls belonging to other parties was a weakness in the planning stage. In the implementation stage, the retribution receipts at the Kayubulan Market did not reach the target in 2020 due to the COVID-19 pandemic. In addition, the determination of the retribution rate had not fully referred to Local Regulation Number 6 of 2017. It was due to 72% of vendors were also charged with leasing stalls to other parties as a means to trade. On the other hand, the owner of the stall is not designated as the subject of retribution at the Kayubulan Market. In the evaluation stage, the principles of accountability and transparency in the management of retribution at the Kayubulan Market had been applied by including a ticket at the time of collection and reconciliation every 3 (three) months. (2) The factors that determine the success of service retribution policy at the Kayubulan Market can be improved through good coordination and communication between all parties involved and the activeness of collectors in carrying out retribution collection. However, the provision of facilities needs to be implemented effectively to increase the potential for retribution in the Kayubulan Market. The bureaucratic structure also had not been fully supported because the SOP (Standard Operating Procedure) had not been established during the implementation of the policy. In addition, the necessity of Market Head and Collector had not been demonstrated through the Kayubulan Market Management Structure.

Keywords: Policy Implementation, Market Service Retribution

